

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dunia sepertinya tidak bisa lepas dengan konflik, setelah apa yang terjadi pada Perang Dunia II yang merusak sebagian besar kawasan di dunia yang terlibat di dalamnya. Paska Perang Dunia ke-II, Dunia kembali dikecam dengan adanya terror perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, meskipun dulu keduanya menjadi partner di dalam perang dunia II namun tak lama setelah PD II usai, keduanya terlibat dalam persaingan dan konflik kepentingan. Pada 5 Agustus 1946, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill menyambut Presiden AS, Harry S Truman, dan memberikan kabar bahwa Uni Soviet dan sekutunya telah membangun "tirai besi" di sepanjang perbatasan Eropa Barat dengan Eropa Timur sebagai jaminan kontrol Moskwa atas teritorial di belakang "tirai" tersebut, tindakan tersebut diambil Uni soviet setelah negara itu berhasil membebaskan Eropa timur dari tangan Jerman. Di sisi lain, Uni Soviet juga mencurigai perilaku AS yang makin tampak ingin menggantikan posisi Inggris sebagai kekuatan kapitalis internasional. Eropa juga pada saat itu sedang mengalami masa kelam di dalam sejarah pasca perang dunia II yang hampir merusak seluruh sarana dan prasarana di hampir sebagian besar negara di eropa, Akibat perang tersebut, sekitar 15 juta personel militer dan 35 juta warga sipil tewas dan lebih banyak lagi yang terluka. Inggris saja misalnya harus

menanggung utang yang cukup besar akibat dari perang dunia ke II. Akan sangat berat bagi Eropa untuk bisa segera bangkit kembali jika harus mengandalkan kekuatan sendiri.

Amerika Serikat sebagai salah satu poros kekuatan dunia mengambil kesempatan dalam kesempitan yang dialami oleh Eropa dengan program bantuan pemulihan di kawasan Eropa Barat atau yang lebih dikenal dengan *Marshall Plan (1947)*¹. AS berusaha membantu membangun kembali ekonomi Eropa khususnya bagian barat. Bantuan itu sekaligus dimaksudkan untuk melancarkan politik luar negeri AS dalam menerapkan apa yang disebut sebagai "kebijakan pembendungan" (containment policy) terhadap ideology komunis Uni Soviet. Tidak mau kalah dengan Amerika Serikat, Uni Soviet membentuk program pemulihan di kawasan Eropa, khususnya Eropa timur dengan *Molotov Plan*, dan juga mulai menyebarkan ideologinya dengan apa yang ilmuwan politik pada waktu itu disebut sebagai *Politik Domino*². Sejak itulah terjadi konflik kepentingan kedua negara semakin besar. Power kedua negara tersebut membuat negara-negara pada perang dingin harus tunduk dan didominasi oleh kedua negara di masing-masing blok, Amerika di kawasan Blok barat dan Uni

¹ Marshall Plan adalah proposal rencana yang disampaikan pada Juni 1947 oleh Menteri Luar Negeri George Marshall, meminta pemerintah Eropa untuk merancang program bantuan terkoordinasi yang akan didanai oleh AS. Francisco Alvarez-Cuadrado "The Marshall Plan" in *Journal Department of Economics*, McGill University pg. 2

² Teori Domino atau Efek Domino adalah teori didasarkan pada kenyataan bahwa jika domino yang berdiri di ujung salah satu sedikit di belakang yang lain, jika terjadi dorongan kecil pada domino

Soviet di kawasan Blok timur sehingga struktur dunia pada waktu itu berubah menjadi bipolar.

Upaya pembendungan ideology komunisme oleh Amerika Serikat tersebut semakin diperkuat dan bergerak ke arah yang lebih besar ketika pada tahun 1949 dibentuk pakta persekutuan militer antara AS dan negara-negara Eropa Barat dalam wadah NATO. Sementara itu, sebagai upaya mengimbangi NATO, pada 1955 Uni Soviet memprakarsai terbentuknya Pakta Warsawa sebagai pertahanan militer dari blok komunis. Sejak saat itu, dunia mulai dibagi menjadi dua kutub kekuasaan. Satu sisi berada di bawah Amerika Serikat (*North Atlantic Treaty Organization* atau *NATO*) dan di sisi lain di bawah Uni Soviet (Pakta Warsawa). Berdirinya kedua pakta tersebut menyebabkan muncul rasa saling curiga, ketidakpercayaan, dan kesalahpahaman antara kedua blok baik blok barat maupun blok timur. Amerika dituduh menjalankan politik imperialis untuk mempengaruhi dunia sementara Uni Soviet dianggap melakukan perluasan dominasinya atas negara-negara demokrasi melalui ideologi komunisme.

Dalam Perang Dingin Peran Amerika Serikat tidak hanya ikut dalam masa pemulihan pasca perang dunia II di Eropa itu saja, mengetahui kekuatan Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet semakin besar, Amerika Serikat mulai memperlihatkan pengaruhnya di kawasan barat dengan alasan ancaman besar kekuatan militer dari Uni Soviet, Mengingat ancaman militer yang dirasakan dari Uni Soviet dan kelemahan dunia Barat dalam hal kemampuan perang konvensional

(trauma terhadap perang dunia ke-II), AS mulai memberikan proposal payung keamanan nuklir di kawasan eropa barat dan proposal tersebut akhirnya disetujui oleh semua anggota kawasan blok barat yang masuk dalam keanggotaan NATO sebagai sebuah langkah pertahanan dari ancaman blok timur pada waktu itu. Bahkan penggunaan bom atom yang disahkan dan kemampuan Amerika Serikat menggunakannya jika serangan atau invasi terjadi kepada salah satu anggota NATO, sebagai jaminan terhadap keamanan kawasan Eropa Barat. Peran Amerika Serikat inilah yang menjadikan penulis Geir Leundestad dalam bukunya “American Empire” bahwa hegemoni Amerika Serikat pada saat Perang Dingin merupakan “empire of invitation”, kesimpulannya Amerika Serikat – Eropa dalam menjalin kerja sama merupakan kerja sama yang saling menguntungkan diantara keduanya.³ Sepertinya pada waktu itu Eropa memang tidak mempunyai banyak pilihan, karena memang keadaan paska Perang Dunia ke-II yang merusak seluruh infrastruktur di kawasan Eropa, sehingga Eropa benar-benar membutuhkan bantuan untuk proses pemulihan secara keseluruhan.

Dibentuknya Pakta Pertahan di kedua kubu merupakan salah satu pemicu keras terjadinya persaingan yang semakin panas antara Amerika Serikat – Uni soviet, terutama dalam perkembangan organisasi pakta pertahanan kedua blok, namun secara struktur dan manajemen organisasi Pakta Pertahan NATO bergerak lebih baik

³ Geir Leunstad, The American Empire “(London: Oxford University Press, 1990) on Montly Review ,
Washington, New Internationalism, U.S.H. ... and inter imperialist rivalries hal. 2

dibanding Pakta Warsawa contohnya dalam hal persaingan riset dan eksperimen dalam peningkatan kualitas persenjataan dan logistik NATO, NATO memiliki anggaran operasional tersendiri terhadap hal itu, NATO juga mempunyai beberapa mekanisme untuk menjalankan kegiatannya. Terbagi dalam dua tubuh besar yaitu struktur militer dan struktur politik yang masing-masing terbagi lagi dalam komisi khusus. Kedua struktur ini yang membahas dan mengevaluasi peristiwa-peristiwa, mengeluarkan pernyataan, membuat keputusan dan menerapkan tindakan-tindakan yang menjadi dasar rujukan bagi penentuan kebijakan NATO sangat tergantung dari persepsi masing-masing negara anggota, yaitu apakah peristiwa-peristiwa tersebut berdampak regional yang akan membawa pada suatu instabilitas kawasan ataukah tidak, dan mungkin berimbas pula pada terganggunya stabilitas internasional yang aman dan damai. Ini memperlihatkan NATO serius dalam menangani persaingan dengan Pakta Warsawa bersama Uni Soviet. Sedangkan Pakta Warsawa sendiri lebih bertindak secara radikal dengan politik domino Uni Soviet, menggunakan Pakta Warsawa lebih berperan aktif dalam menundukan wilayah selatan Eropa timur (arah ke Eropa barat) dan sekitarnya untuk tunduk terhadap ideology komunis. Bahkan kawasan Asia seperti China, Korea Utara dan Vietnam masuk dalam ideology komunis.

Perlu diketahui juga Perang Dingin yang melibatkan dua kubu Blok barat dan Blok timur ini merupakan Perang Psikologi (tidak pernah terjadi perang fisik secara langsung). Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok timur dipimpin

oleh Uni Soviet, kedua negara tersebutlah yang membawa isu akan terjadi Perang secara fisik antara blok barat dan blok timur sehingga negara yang merasa terancam atas ancaman tersebut ikut tergerak dan masuk ke dalam perangkap hegemony kedua negara superpower tersebut. Dasar dari konflik kedua negara raksasa tersebut adalah ideologi yang sangat jauh berbeda atau bertolak belakang antara keduanya, Amerika Serikat yang menganut ideologi *liberal-kapitalis*, sedangkan Uni Soviet berideologi *sosialis-komunis*. Kemampuan militer dan pengembangan persenjataan bom atom yang dimiliki keduanya menjadi kedua negara raksasa tersebut berebut dalam mencari pengaruh dan hegemony di dunia dengan cara memberikan ancaman-ancaman secara psikologi yang dapat memicu Perang Dunia ke-III, seperti memamerkan persenjataan teknologi baru, peragaan kekuatan militer dan pada saat itu gempur persaingan teknologi luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tidak hanya itu Upaya besar-besaran juga dilakukan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan pengaruh dan koalisi bisa terlihat dari sikap mereka yang aktif dan agresif dalam setiap aktivitas di dunia Internasional.

Namun pada kenyataannya kedua negara tersebut tidak pernah bertempur secara langsung namun konflik di antara keduanya secara tak langsung telah menyebabkan berbagai perang lokal dan konflik di beberapa negara sekitarnya (seperti Perang Korea, invasi Soviet terhadap Hungaria dan Cekoslovakia dan Perang Vietnam). Rivalitas keduanya semakin di dukung dengan adanya pakta pertahanan, dari blok barat yang tergabung dalam NATO dan di blok timur yang tergabung dalam Pakta

Pakta Warsawa yang secara resmi bubar pada tanggal 1 Juli 1991. Kekalahan Uni Soviet atas Amerika Serikat pasca Perang Dingin merupakan awal kemunculan kekuatan tunggal di dunia internasional yakni Amerika Serikat, tidak ada kekuatan yang sanggup menyaingi negara raksasa dari Blok Barat tersebut, oleh karena itu Amerika Serikat berusaha memposisikan diri sebagai negara *superpower* serta bertindak aktif dalam isu-isu dan keterlibatan di dunia internasional. Bahkan sempat terjadi pergeseran *balance of power* di dunia internasional dari Bipolar ke Unipolar dibawah kendali Amerika Serikat sebagai aktornya.

Setelah berakhirnya Perang Dingin yang ditandai oleh runtuhnya kekuatan Uni Soviet, eksistensi NATO dianggap kurang relevan sehingga sebagai aliansi militer NATO terancam bubar, karena memang tujuan awal dibentuknya pakta pertahanan adalah untuk menghadang Pakta Warsawa dan Uni Soviet. Namun pada akhirnya, NATO tetap bertahan dengan alasan historis dan kebutuhan akan pengimbangan kekuasaan melalui improvisasi baik dalam fungsi, cakupan dan dasar tujuan pembentukannya.⁴ Disamping itu ketakutan akan negara-negara Eropa yang sebagian besar masih rawan terhadap ancaman-ancaman keamanan. Selain itu Amerika Serikat juga termasuk negara yang setuju dengan keputusan mempertahankan NATO. Disamping itu Amerika Serikat bersikukuh untuk mempertahankan NATO, hingga sampai saat ini Amerika Serikatlah yang paling serius dalam pengelolaan organisasi di NATO, Sebagai negara yang dominan, Amerika Serikat melihat NATO adalah

⁴ M. P. ... "Dampak Berakhirnya Kesepakatan NATO terhadap Hubungan NATO Rusia" dalam

sebuah opsi internasional yang dipandang akan membawa manfaat terhadap kebijakan dan kepentingan nasional Amerika Serikat serta dukungan mayoritas terutama dalam bidang militer bagi anggota-anggota NATO yang dibutuhkan dalam setiap aksi dan tindakannya. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apa sebenarnya alasan utama NATO untuk tetap mempertahankan eksistensinya pada saat masa 'damai' paska runtuhnya Pakta Warsawa? Bukankah dengan runtuhnya Uni Soviet menjadikan NATO tidak lagi mempunyai ancaman yang signifikan? Dengan bayang-bayang kepemimpinan Amerika Serikat didalamnya apakah NATO akan berjalan sesuai dengan visi dan misi awalnya? Sehingga ini menjadi sangat menarik untuk ditelusuri guna mengungkapkannya sebagai jawaban atas segala teka teki yang muncul dalam pikiran kita.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian diatas penulis merumuskan permasalahan yang akan diangkat sebagai berikut :

“ Bagaimana Dampak runtuhnya Uni Soviet bersama dengan Pakta Warsawa terhadap pengaruh dominasi Amerika Serikat di dalam NATO? ”

C. KONSEP KERANGKA PEMIKIRAN

1. Teori Sistem

Kata sistem berarti sebagai bagian dari keseluruhan di dalam batasan yang ditetapkan, dimana di luarnya terdapat lingkungan. Penetapan batas biasanya dilakukan untuk membantu analisis manusia, seperti yang dilakukan oleh biologis, misalnya, untuk menganalisis ekosistem di daerah tertentu. Sistem biasanya terdiri dari elemen-elemen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam pola-pola tertentu. Dalam buku *Contending Theories* menyatakan bahwa Teori sistem adalah hubungan antara variable independen dan dependen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang diantara variable tersebut bisa saling berkerja sama, saling mengikuti dan berubah tergantung pada kombinasi variabelnya. Sebuah kendaraan bermotor, sistem saraf manusia, sebuah pesawat ruang angkasa, jaringan hotel, sebuah akuarium percobaan ekologi laut dan sistem balance of power, semua itu adalah sebuah sistem.⁵

Di dalam ilmu hubungan internasional kata sistem telah banyak digunakan dalam berbagai paradigm penelitian. Robert Cox mengatakan bahwa teori sistem menggabungkan dua pendekatan yang berbeda dalam ilmu hubungan internasional, yaitu pendekatan aksi-internal dan pendekatan structural⁶. Sistem

⁵ Dougherty, James E., and Robert L. Pfaltzgraff, Jr. *Contending Theories of International Relations*, 5th ed. (Addison, Wesley, Longman, 2001) hal.102

⁶ *ibid* hal. 100

menghubungkannya melalui agregasi aksi dan interaksi state menjadi sebuah pola yang membentuk struktur yang mempunyai karakter tersendiri.

Setiap sistem adalah, dalam arti tertentu, jaring komunikasi yang memungkinkan arus informasi yang mengarah ke proses menyesuaikan diri. setiap sistem memiliki input dan output, output dari satu sistem mungkin menjadi input lain yang telah digabungkan. ketika sistem berada dalam dua arah, maka itu sedang terjadi "umpan balik". biasanya kita membedakan "negara dari suatu sistem" dari "karakteristik perilaku" dari suatu sistem. beberapa input dapat mempengaruhi negara-negara dari sistem dan membuat gangguan pada keseimbangannya, setelah itu sistem kembali ke negara normal. input lain mungkin memiliki dampak seperti itu untuk mengubah karakteristik perilaku sistem; bukannya kembali ke keadaan semula keseimbangan, mungkin mencapai keseimbangan pada tingkat yang berbeda dan di bawah karakteristik kondisi operasi yang berbeda.⁷

Berdasarkan teori system diatas dapat dijelaskan bahwa dunia internasional secara tidak langsung sudah menciptakan system yang mana system tersebut berisi sub-system-sub-system atau negara itu sendiri yang saling berinteraksi, berhubungan satu dengan yang lainnya dan juga dengan lingkungan yang hubungan dan interaksi itu saling berubah dan mengikuti sesuai dengan variable dan kombinasi dari sub-system-sub-system lainnya, ketika ada pergerakan dari sub-system satu ke sub-system lainnya maka akan menyebabkan perubahan variabel system dan berpengaruh ke sub

1. Teori Hegemoni Gramsci

Dalam konsep Antonio Gramsci yang melihat supremasi kelompok mewujudkan diri dalam dua cara yakni *dominasi* dan kepemimpinan intelektual dan moral atau biasa disebut *hegemoni*.⁸

a. Konsep Dominasi

Dominasi adalah Suatu bentuk hubungan kekuasaan yang si penguasa sadar akan haknya untuk memerintah sedangkan yang diperintah sadar akan dirinya dan menjadi kewajiban untuk taat pada penguasa.⁹ Dengan kata lain, dominasi adalah kekuasaan yang dominan yang dapat mengatur individu atau kelompok dimana individu atau kelompok tersebut menerimanya sebagai bentuk ketundukan terhadap kekuasaan yang dominan. Gramsci mengatakan bahwa dominasi erat kaitannya dengan hubungan kekuasaan dengan menggunakan paksaan.

Marx mendeskripsikan bahwa ketika kelas dominan dalam masyarakat mengemban dan mengambil alih bentuk-bentuk ideology yang mengabsahkan dominasi, maka pada saat yang sama kelas dominan mempunyai kendali terhadap produksi intelektual sehingga dengan dominasi secara umum gagasan pihak-pihak yang tidak mempunyai sarana produksi menjadi terwadahi oleh suasana tersebut.¹⁰

⁸
⁹
¹⁰

b. Konsep Hegemoni

Menurut Gramsci, hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni adalah suatu organisasi konsesus. Dalam beberapa paragraf dari karyanya *Prison Note Book*, Gramsci menggunakan kata *direzione* (kepemimpinan atau pengarahan) secara bergantian secara hegemonia (hegemoni) dan berlawanan dengan *dominazione*.¹¹

Sebuah tatanan yang hegemonik, dalam perspektif Gramscian, adalah suatu kondisi di mana hubungan antar kelas dan antara negara dan masyarakat sipil dicirikan oleh persetujuan (consent) alih-alih paksaan (coercion)¹². Agar yang dikuasai mematuhi yang menguasai, menurut Gramsci, yang pertama tidak saja harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma-norma yang diusung oleh yang kedua, tetapi juga lebih dari itu mereka harus memberikan persetujuan atas subordinasi mereka¹³.

Menurut Gramsci, supremasi suatu kelompok sosial atau kelas berlangsung dalam dua bentuk: dominasi dan hegemoni. Yang pertama berbasis pada paksaan (coercion), sedangkan yang kedua berbasis pada persetujuan (consent). Dengan kata

¹¹ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal 20.

¹² Gill, Stephen, ed. (1993), Gramsci, *Historical Materialism and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press. Hal. 93

lain, supremasi bisa diperoleh melalui dua jalur, yakni eksternal (melalui ganjaran dan hukuman) dan internal (internalisasi nilai dan norma pada diri individu), atau mudahnya secara terpaksa dan suka rela. Sementara dominasi diperoleh melalui penggunaan alat pemaksa berupa negara, atau lebih tepatnya masyarakat politik, hegemoni diperoleh melalui masyarakat sipil berupa pendidikan, agama, dan lembaga-lembaga sosial. Hegemoni, karenanya mensyaratkan “kepemimpinan moral dan kultural” (moral and cultural leadership).¹⁴

Dalam situasi hegemonic, Massa yang memberikan persetujuannya harus benar-benar menganggap bahwa kepentingan dari kelompok dominan merupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan bahwa kelompok tersebut berperan untuk mempertahankan tatanan sosial sebagaimana yang dikehendaki oleh semua orang . Persetujuan itu diperoleh melalui sistem dan struktur kepercayaan, nilai, norma dan praktik keseharian yang secara tidak disadari melegitimasi tatanan yang ada.¹⁵

Mengingat pentingnya aspek persetujuan dalam teori hegemoni Gramsci, maka penggunaan metode koersif merupakan pilihan terakhir untuk mengantisipasi ”situasi krisis kepemimpinan ketika kesadaran spontan menemukan kegagalannya.”

¹⁴ Femia, Joseph V. (1987), *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*, New York: Oxford University Press. Hal. 24

Gramsci, Antonio (1971), *Selection from The Prison Notebooks*, London: Lawrence and Wishart. Hal.57

¹⁵ W. H. R. Rivers (1902) *Concepts of Group and Personality and Postmodernism* London: Routledge

(Gramsci, 1971).¹⁶ , penggunaan metode koersif tersebut menunjukkan kelemahan ideologis dan cultural dari penguasa yang sedang mengalami krisis hegemoni. Selain persetujuan, aspek penting yang lain, yang juga terkait dengan aspek persetujuan, adalah legitimasi. Persetujuan yang diberikan oleh kelompok atau kelas yang dipimpin sama artinya dengan legitimasi bagi kelas atau kelompok yang memimpin. Jika persetujuan ini gagal diperoleh, atau sudah mulai tercerabut, maka akan terjadi krisis legitimasi yang pada akhirnya akan mengancam status hegmonik suatu kelas atau kelompok., hegemoni sangat identik dengan legitimasi (lebih jauh tentang legitimasi dalam teori hegemoni Gramsci, lihat Martin, 1997).

Jadi, menurut Gramsci ada perbedaan dominasi dan hegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi menggunakan kekuatan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepentingan politik dan ideology.

Dari berbagai literature yang didapat, secara umum karakteristik Dominasi dan Hegemoni adalah sebagai berikut¹⁷ :

<i>Karakteristik Dominasi</i>	Karakteristik Hegemoni
<ul style="list-style-type: none"> • Lebih pada pemanfaatan kekuasaan (power). 	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada gaya kepemimpinan.
<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan paksaan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Identik dengan legitimasi.

¹⁶ Gramsci, Antonio (1971) *ibid.* hal.12

¹⁷ Lihat Tulisan Gramsci, Antonio (1971), *Selection from The Prison Notebooks* dan Tulisan Yohannes

aplikasinya.	
<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung menekan dan menggunakan kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berbasis pada persetujuan atau kepatuhan.
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya keseimbangan kekuatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat suka rela.

Sebagai salah satu pendiri dan pengagas NATO tentunya Amerika Serikat mendapatkan porsi besar dan posisi yang berpengaruh tentunya di NATO, tidak dipungkiri Amerika Serikat sudah mendominasi perannya di dalam NATO dalam bentuk pengaruh dan kebijakannya terutama dalam bidang militer. Jauh sebelum NATO, masih dalam bentuk regional Blok Barat, Amerika Serikat mampu mengontrol dan mengkomando Eropa Barat pasca perang dunia II, perangkap hegemony AS bermula dari Marshall Plan untuk mengambil hati negara-negara di Eropa terutama Inggris yang pada saat itu pengaruhnya di Eropa cukup besar. Tidak lama setelah itu dibentuknya NATO juga merupakan bentuk hegemony Amerika Serikat dimana kepentingannya melawan Blok Timur (Pakta Warsawa dan Uni Soviet), namun kepentingan itu mampu disulap Amerika Serikat sebagai kepentingan bersama Blok Barat dalam menghadang ancaman dari Blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet bersama Pakta Warsawanya). Selain itu Amerika Serikat memanfaatkan ketakutan negara-negara Eropa barat pasca perang dunia II dan ancaman keamanan dari blok timur (Uni Soviet) dengan mengajukan proposal tentang keamanan

nuklirnya di kawasan Eropa barat sebagai perlindungan seluruh kawasan Blok barat dan proposal itu pun disetujui oleh semua anggota NATO

Seperti yang dijelaskan dalam teori hegemoni gramsci bahwa hegemoni Amerika Serikat terhadap NATO sangat besar untuk mewujudkan dunia yang menganut system unipolar dengan Amerika Serikat sebagai pusatnya. Dalam teorinya gramsci mengatakan bahwa Dalam situasi hegemonic, Massa yang memberikan persetujuannya harus benar-benar menganggap bahwa kepentingan dari kelompok dominan merupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, jadi secara tidak langsung hegemoni merupakan kepemimpinan yang terselubung untuk mencapai kepentingan dalam suatu hal ini terjadi pada Amerika Serikat yang hegemon terhadap NATO, Teori hegemoni gramsci ini terbukti dengan penerapan pasal V NATO oleh Amerika Serikat yang menyebutkan tragedi nine eleven sebagai "axis of evil" dan merupakan serangan bagi seluruh anggota di dalam NATO, yang mana penerapan pasal V NATO tersebut baru pertama kalinya di terapkan. Tidak hanya itu Amerika Serikat dengan posisi superiornya di NATO sekarang telah menjadi instrument penting dalam politik luar negeri Amerika Serikat sebagai kepemimpinan global.

1. Konsep Power

Power adalah konsep yang sangat kompleks yang oleh Brown (1997) menuliskan bahwa konsep power memiliki tiga kategori yang saling berkaitan yaitu :¹⁸

¹⁸ G. J. Brown, *Understanding International Relations*, London: Macmillan Press Ltd. (1977) hal. 87

1. *Power* adalah *attribute*. *Power* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok atau sebuah negara untuk disebarakan ke seluruh dunia.
2. *Power* adalah *relationship*. *Power* adalah kemampuan seseorang atau sebuah negara untuk mempengaruhi pihak lain dalam rangka mencapai tujuannya.
3. *Power* adalah bagian dari struktur dan hal ini lebih mudah diwujudkan dalam dunia nyata. Dalam hubungan internasional *power* sebagai struktur tampak dalam system yang diakui sehingga menghasilkan wewenang.

Sementara Henderson (1998) menuliskan *power* adalah konsep yang sukar untuk dipahami, namun perannya sangat penting dalam hubungan internasional. *Power* adalah kemampuan seorang actor untuk membujuk atau memaksa pihak lain. Sehingga memberikan pengendalian bagi actor tersebut. *Power* terwujud dalam dua bentuk yaitu *soft and hard*.¹⁹

Soft Power adalah kemampuan untuk membujuk pihak lain agar melakukan sesuatu melalui pengaruh yang dimiliki. Dalam tataran bernegara hal ini dapat terlihat pada ideology dan kebudayaan yang diikuti oleh negara lain. *Hard Power* adalah kemampuan suatu negara untuk memaksa kehendaknya melalui kekuatan militer atau ekonomi atau kombinasi keduanya(Henderson, 1998).

Power adalah factor yang sangat penting dalam perpolitikan dunia beberapa analis bahkan menyatakan bahwa *power* adalah satu-satunya elemen paling penting dalam interaksi dunia. *Power* adalah sumber daya politik yang berubah-ubah dan

¹⁹ Conway W. Henderson, *International Relations: Conflict and Cooperation of The Turn of The 21st Century*, Singapura: Me.Graw-Hill. (1998), hal.101

merupakan total dari semua elemen yang dimiliki suatu negara yang memungkinkannya untuk memenangkan kepentingan nasionalnya di atas kepentingan nasional negara lain (Rourke. 1986)²⁰. Senada dengan Morgenthau dan Thompson (1985)²¹. Yang menyatakan bahwa power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau pihak tertentu untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan orang atau pihak lain.

Dengan mendasarkan pada dikotomi *tangible-intangible*. Rourke (1986)²² menuliskan elemen dari power. *Elemen tangible* adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat dihitung seperti karakteristik fisik, karakteristik populasi, sumber daya alam, produk industrial, produk pertanian, kemampuan teknologi informasi dan kemampuan militer. *Elemen Intangible* adalah semua sumber daya yang dimiliki suatu negara yang tidak dapat dihitung misalnya kekuatan pemerintahan. Kekuatan rakyat, persenjataan militer dan reputasi negara tersebut.

Plano dan Olton (1969)²³ menuliskan sepuluh komponen utama *power* adalah: (i) ukuran, lokasi, iklim dan topografi wilayah suatu negara; (ii) sumber daya alam. Sumber energy dan makanan yang dapat diproduksi di negara tersebut; (iii) populasi, ukurannya, kepadatan, komposisi umur dan jenis kelamin dan hubungannya dengan

²⁰ John. T Rourke,, *International Politics on The World Stages*, Hartford: University of Connecticut(1986), hal. 178

²¹ Hans. J. Morgenthau. Dan Kenneth. W. Thompson. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace 6th ed*, New York: Alfred A. knopf, inc. (1985), hal. 32

²² Rourke, Ibid Hal. 185

²³ J. A. G. Rees, *The International Relations Dictionary*, England: Heinemann Ltd (1969)

GNP di suatu negara; (iv) ukuran dan tingkat efisiensi industry yang memproduksi di suatu negara; (v) ketersediaan dan efektivitas system transportasi dan komunikasi; (vi) system pendidikan, fasilitas penelitian, jumlah dan kualitas peneliti yang tersedia di negara tersebut. (vii) jumlah, keterampilan perlengkapan dan moral angkatan bersenjata yang dimiliki; (viii) keadaan dan kekuatan politik. Ekonomi dan system social; (ix) kualitas diplomat diplomat dan kemampuan diplomasi serta (x) karakter dan moral masyarakatnya.

Coulombus dan Wolfe (1986)²⁴ juga mengemukakan bahwa untuk memahami konsep *power* adalah dengan menganggapnya sebagai hubungan diantara keinginan yang independen. Dilain pihak cara terbaik untuk mengoperasionalkan dan mengukur kapasitas sebuah negara untuk menjalankan power adalah dengan menkonsentrasikan perhatian pada atribut-atribut spesifiknya yang bisa diukur. “kami menganggap power sebagai campuran yang berisikan campuran unsure-unsur persuasi yang berbeda yang dimulai dari koersi militer kepada rangsangan-rangsangan ekonomi sampai kepada solidaritas ideologis dan bujukan-bujukan moral jadi kami mendefinisikan power sebagai pegangan konsep yang menunjukkan segala sesuatu yang bisa menentukan dan memelihara kekuasaan actor A terhadap actor B.”

²⁴ Coulombus dan Wolfe (1986) *International Power: A Conceptual Framework* (1986) hal. 66

Power memiliki tiga unsure penting:²⁵

- Unsur keadaan (*force*). Sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi dan sarana lainnya demi tujuan politik.
- Unsur pengaruh (*influence*), yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi dengan menjamin perilaku dan keinginan seperti harapan si penyuruh.
- Unsur wewenang (*authority*) yaitu kesadaran menerima apa saja yang diperintah oleh pewewenang.

Power ini dapat ditujukan baik dalam ruang lingkup internal yaitu wilayah dan populasi dalam negara maupun lingkup eksternal yang meliputi wilayah dan populasi di luar suatu negara.

NATO dibentuk berdasar tekanan blok timur terhadap blok barat yang pada saat itu lawannya adalah Pakta Warsawa pada perang dingin yang sebenarnya perang tersebut merupakan perang US(Uni Soviet) – US(Amerika serikat), dan seharusnya pembentukan NATO juga harus bubar sejalan dengan tujuannya telah tercapai dalam menghadang pergerakan pakta warsawa pada waktu itu, namun Amerika Serikat tetap bersikukuh untuk mempertahankan NATO, sepertinya Amerika sadar terhadap pentingnya organisasi internasional dan keamanan kolektif bagi masa depan kepentingannya. Jauh sebelum NATO terbentuk parlemen Amerika dengan persetujuan cepat memutuskan bahwa dengan ini kongres mendukung pembentukan

mekanisme internasional dengan kekuatan yang memadai untuk menciptakan dan mempertahankan perdamaian yang adil dan kekal bagi seluruh bangsa di dunia. Kongres juga mendukung keikutsertaan Amerika Serikat didalamnya melalui proses-proses konstitusionalnya. Persetujuan ini mendukung Amerika untuk selalu ikut serta dengan segala aktivitas internasional terutama dalam hal Organisasi Internasional seperti NATO.

Pasca perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat (AS) kini menjadi negara *superpower* di panggung politik internasional. Dengan kekuatan militer tanpa tandingan, AS mampu mendiktekan berbagai kebijakan luar negerinya ke seantero penjuru dunia. Bukan hanya dominasi dalam kebijakan politik dan militer, tetapi juga melalui globalisasi AS menanamkan budaya-budayannya kepada negara-negara lain. Ini menunjukkan bahwa power atau kekuatan Amerika Serikat meningkat statis, apalagi dengan berada di dalam keanggotaan NATO.

Disimpulkan bahwa power Amerika Serikat di NATO berdasarkan definisi Brown (1977)²⁶ sangat besar. Amerika memiliki tiga komponen power yaitu power sebagai atribut. Kemudian power sebagai relationship dan power sebagai bagian dari struktur. Hal ini dapat dilihat dari power Amerika Serikat sebagai pengagas NATO dan mempertahankan NATO walau Pakta Warsawa telah runtuh dan mempengaruhi negara lain untuk ikut berpartisipasi dalam keanggotaan NATO (bahkan anggota

bekas koloni blok timur banyak yang masuk keanggotaan NATO). dan juga banyak aksi militer NATO dibawah komando Amerika Serikat.

D. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang dan melihat rumusan masalah diatas dengan menggunakan kerangka konseptual maka dapat ditarik suatu hipotesa sebagai berikut: Dampaknya adalah kecenderungan Dominasi Amerika Serikat yang berkembang menjadi Hegemony di dalam NATO.

E. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI

1. Untuk mengetahui Dampak-dampak dominasi Amerika Serikat dalam bidang militer di NATO pasca runtuhnya Pakta Warsawa..
2. Untuk mengetahui arah pergerakan NATO dibawah dominasi Amerika Serikat.
3. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah dalam suatu karya ilmiah yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penulisan ini penulis mencoba menganalisa permasalahan dengan menerapkan studi pustaka dan berbagai sumber yang ada. Seperti buku-buku

membawa Dunia untuk beralih dari Bipolar ke Unipolar yang berpusat pada Amerika Serikat.

BAB IV akan membicarakan Perkembangan NATO pasca Perang Dingin dan bentuk Dominasi Amerika Serikat terhadap NATO yang berubah menjadi Hegemony terhadap NATO Paska runtuhnya Pakta Warsawa (masa depan NATO).

BAB V akan membahas kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab I bab II bab